



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KECAMATAN TANGGUL

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN	9
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TANGGUL	9
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN TANGGUL	12
E. SARANA PRASARANA KECAMATAN TANGGUL	13
F. ANGGARAN KECAMATAN TANGGUL	14
G. ISU STRATEGIS	15
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	27
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	30
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TANGGUL	31
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	41
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	45
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	70
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	72
BAB IV PENUTUP	84
LAMPIRAN	86
LAMPIRAN 1. KERTAS KERJA TC 25 DAN TC 27	86
LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	92
LAMPIRAN 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024	94
LAMPIRAN 4. RENCANA AKSI TAHUN 2024	105
LAMPIRAN 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024	111
LAMPIRAN 6. CASCADING KECAMATAN TANGGUL	117

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Tanggul. Kinerja Kecamatan Tanggul diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanggul Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul Tahun 2024.

Jember, 20 Januari 2025

Camat Tanggul
Kabupaten Jember



Hanifah, S.Pt, M.Si
Pembina

NIP. 19710123 200604 2 021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanggul Tahun 2024.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada tujuan dan sasaran strategis kabupaten jember berdasarkan Rekomendasi TIM SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut indicator kinerja utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indicator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indicator sasaran. Perubahan tersebut tercermin dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Tanggul.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode 2021 s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember.
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja PD Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan terutam dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
6. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Tanggul tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat **Predikat Nilai Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan capaian 100 % menunjukkan predikat sangat memuaskan.
- Sasaran 2* Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat **Predikat Nilai Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan capaian 110 % menunjukkan predikat sangat memuaskan.
- Sasaran 3* Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat **Predikat Nilai Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan capaian 100 %.
- Sasaran 4* Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat **Predikat Nilai Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan capaian 100 % menunjukkan predikat sangat memuaskan
- Sasaran 5* Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien mendapat **Predikat Nilai Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan capaian 112 %.
- Sasaran 6* Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat **Predikat Nilai Tinggi** , Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan capaian 109,68 %

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Tanggul telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 indikator capaian sesuai target yaitu 100 % dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 99 % merupakan Belanja Operasional sebesar Rp4.616.504.335 dan Belanja Modal sebesar 1 % atau sebesar Rp62.537.300.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.960.670.095 atau 84,65 % dari pagu anggaran sebesar Rp4.679.041.635. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan :

1. Standart Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Di Wilayah Sehingga Anggaran Tidak Bisa Terserap dikarenakan selisih harga.
2. Perubahan APBD Tahun 2024 terdapat penambahan anggaran TPP yang melebihi kebutuhan, hal ini menjadikan sisa anggaran cukup besar sehingga anggaran tidak bisa terealisasi.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Aplikasi pada masing masing bidang sering mengalami trouble sehingga menghambat kinerja, seperti :
 - a. aplikasi SIAK pada bidang Pelayanan Umum
 - b. Aplikasi SIPD pada bidang perencanaan
 - c. Aplikasi Sikeren pada bidang kepeg|awaian
2. Terbatasnya tenaga ASN
3. Kualitas SDM masih rendah
4. Sarana dan prasarana fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang dan banyak yang rusak
5. Belum adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan
6. Masih rendahnya Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan SUKMA-e
7. Masih Rendahnya peran organisasi masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
8. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain:

1. Melaporkan aplikasi di masing masing bidang yang sering mengalami trouble agar segera di perbaiki.
2. Mengusulkan pemenuhan tenaga ASN sesuai dengan Analisis Jabatan
3. Mengikutsertakan aparatur
4. Untuk memperlancar kinerja dibutuhkan Sarana dan Prasarana yang bagus dengan cara :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
 - b. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak dan masih bisa diperbaiki
5. Membuat inovasi inovasi dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
6. Meningkatkan pemanfaatan SUKAMA-e dengan cara sebagai berikut
 - a. Mensosialisasikan pentingnya umpan balik melalu SUKMA-e kepada masyarakat yang datang ke petugas pealayan umum di kantor Kecamatan Tanggul
 - b. Meningkatkan pemanfaatan SUKMA-e untuk mengukur kepuasan masyarakat secara berkala.
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil SUKMA-e
7. Meningkatkan sinergitas Kecamatan dengan organisasi masyarakat dalam merencanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga tetertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan tanggul

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Tanggul diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tanggul tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Tanggul adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Tanggul
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TANGGUL

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Tanggul diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Tanggul merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum dan dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum
- (2) Kecamatan Tanggul dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan kewenangan di wilayah kerja kecamatan yang dalam tugasnya memperoleh pelimpahan Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- (3) Kecamatan Tanggul mempunyai tugas
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
 - c. Mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

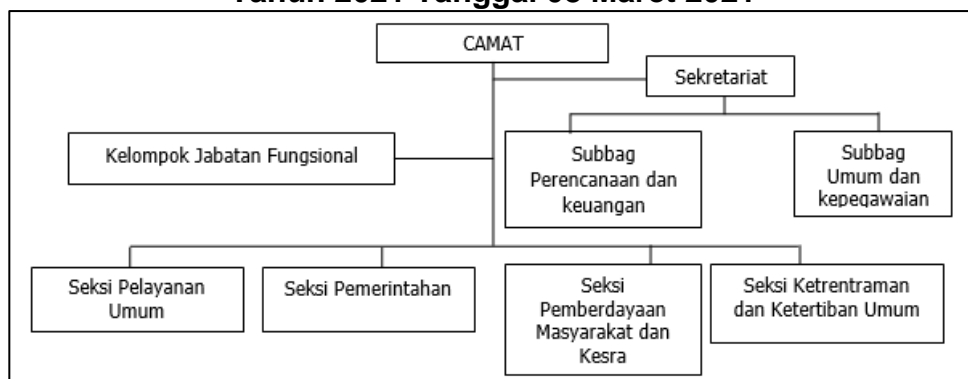
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan latau kelurahan
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Kecamatan Tanggul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa.
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan pemberhentian perangkat desa.
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi pembangunan Kawasan pedesaan,serta penyusunan perencanaan Pembangunan partisipasi.

- l. pelaksanaan pemberian fasilitasi Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga.
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan.
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Tanggul terdiri dari
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
 - g. Desa
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Tanggul Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tanggal 08 Maret 2021



D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN TANGGUL

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Tanggul yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Tanggul yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 16 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 16 orang atau 67 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Tanggul Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	1			1		1				1		1	
2. Pengawas	6			6		4			1	3		2	2
3. Pelaksana SD 1	15	7	6	1		10		9		1		9	1
Jabatan Fungsional													
Non ASN						18	3	14		1		3	15
Jumlah	24	7	6	9	1	16		10	1	4		12	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tanggul 2024

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya *gap* antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan *bezetting* pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Tanggul belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Tanggul.

F. ANGGARAN KECAMATAN TANGGUL

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Tanggul memiliki 4 Program, 10 Kegiatan, dan 20 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.679.041.635 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Tanggul
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 3.687.296.635
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 18.164.000
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 18.164.000
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 2.748.403.083
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 2.685.393.083
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp 63.010.000
1.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp 52.500.000
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 52.500.000
1.4	Administrasi umum perangkat daerah	Rp 118.344.200
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 3.150.000
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 106.693.000
1.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 4.868.700
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 3.632.500
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 643.605.732
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 42.345.000
1.5.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 20.000.000
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 581.260.732
1.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 106.279.620
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 35.750.000
1.6.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 30.000.000
1.6.3	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 40.529.620
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 810.600.000
2.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp 805.200.000
2.1.1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat	Rp 805.200.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	kecamatan	
2.2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp 5.400.000
2.2.1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 5.400.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 51.639.000
3.1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp 51.639.000
3.1.1	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan desa	Rp 5.800.000
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 45.839.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 129.506.000
4.1	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp 129.506.000
4.1.1	Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 129.506.000
	JUMLAH	Rp 4.679.041.635

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tanggul Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Tanggul dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Tanggul dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;

3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;
6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebuna, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Tanggul.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Tanggul terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan Tanggul adalah berkisar 130.406.477 m²/130,41 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Jumlah penduduk di Kecamatan Tanggul sebanyak 94.169 jiwa penduduk laki laki sebanyak 46.856 Jiwa dengan persentase 49,76 % penduduk perempuan 47.313 Jiwa dengan persentase 50,24 % penduduk Kecamatan Tanggul memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian /peternakan 16,37 % sebanyak 15.373 jiwa
2. Belum/Tidak Bekerja 28,29 % sebanyak 26.572 jiwa

3. Wiraswasta 25,23 % sebanyak 23.698 jiwa
4. Pelajar 10,62 % sebanyak 9.978 jiwa
5. ASN 1,27 % sebanyak 1.190 jiwa
6. Tenaga pengajar 0,73 % sebanyak 681 jiwa
7. Nelayan 0,02 % sebanyak 19 jiwa
8. Tenaga Kesehatan 0,14 % sebanyak 135 jiwa
9. Pensiunan 0,46 % sebanyak 432 jiwa
10. Bidang lainnya 17,09 % sebanyak 16.091 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Tanggul membawahi 8 desa yaitu:

1. Desa Darungan
2. Desa Klatakan
3. Desa Kramat Sukoharjo
4. Desa Manggisan
5. Desa Patemon
6. Desa Selodakon
7. Desa Tanggul Kulon
8. Desa Tanggul Wetan

Sumber Data : Kecamatan Tanggul Dalam Angka (BPS)

Desa di wilayah kecamatan tanggul dibagi menjadi 2 katagori yaitu katagori desa mandiri dan desa maju, dari 8 desa yang masuk katagori desa mandiri adalah desa tanggul kulon dan desa patemon karena kedua desa tersebut mempunyai konsep pembangunan di tingkat desa yang mengedepankan partisipasi dan kemandirian masyarakatnya dalam mengelola sumber daya local dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan 6 desa yaitu desa darungan, desa klatakan, desa kramat sukoharjo, desa manggisan, desa selodakon, desa tanggul wetan termasuk katagori desa maju karena desa – desa tersebut memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di desanya.

Kondisi perekonomian di kecamatan tanggul di dukung oleh sektor pertanian, Perkebunan dan peternakan. Pertanian di dominasi oleh tanaman padi jagung, kacang tanah. Sektor Perkebunan yang cukup berkembang adalah Perkebunan kopi. Sektor peternakan di dominasi peternakan di dominasi peternakan ayam dan sapi, disektor industry adalah home industry UMKM batik, kopi argopuro, tahu krispi, snack krupuk dan snack koro.

Potensi wisata di wisata di kecamatan tanggul antara lain wisata religi Habib Sholeh, wisata pemandian patemon , pemandian rengganis, air terjun tancak, karapan sapi.

Kecamatan tanggul merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yang rentan terhadap bencana alam, bencana alam yang sering terjadi di kecamatan tanggul adalah banjir dan tanah longsor. Upaya upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain

1. Selalu membuang sampah pada tempatnya.
2. Membuat saluran air yang baik.
3. Memperbanyak lahan penyerapan air.
4. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air.
5. Membuat Fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik.

Upaya upaya tersebut diharapkan bisa mengatasi bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tanggul.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Tanggul merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Tanggul Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Tanggul yaitu:

Misi:

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan RPJMD :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi, dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2024, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Tanggul adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Kecamatan Tanggul Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2024	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	80%	85%	90%	95%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Tanggul tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
		2021	2022	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80	80	80
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	-	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Tanggul tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP ▪ Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) ▪ Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja ▪ Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E
			-	

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Tanggul Nomor : 065/36/35.09.06/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanggul Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanggul

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas	Persentase Indikator	90%

	Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program yang tercapai	
--	--	-----------------------	--

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 3.687.296.635	APBD
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 810.600.000	APBD
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 51.639.000	APBD
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp 129.506.000	APBD
Jumlah		Rp 4.679.041.635	APBD

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanggul tahun 2024

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tanggul terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Didukung oleh :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Rp3.687.296.635 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 3.687.296.635 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 79% dari keseluruhan belanja Kecamatan Tanggul
- b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Didukung oleh :
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp 810.600.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.810.600.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 17% dari keseluruhan belanja Kecamatan Tanggul
- c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp 51.639.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 51.639.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 1% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tanggul

d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp 129.506.000 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 129.506.000 yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 3% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tanggul

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Tanggul dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Tanggul menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres negatif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TANGGUL

Kecamatan Tanggul telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanggul tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tanggul dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Hasil pengukuran realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87,72	110%	80	110%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
	Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)	B (78,41)	112 %	A (85)	92,25 %
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90 %	98,71%	109,68 %	100 %	98,71 %

Sumber Data Realisasi :

1. Laporan Seksi Pemerintahan, PMKS,Trantib, Kasubag Umpeg serta Kasubag Perencanaan
2. Kertas kerja TC 27
3. Renstra Thun 2021 - 2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 6 indikator sasaran Kecamatan Tanggul rata rata mencapai 100 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan dibandingkan

dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan tercapai sesuai target. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Tanggul telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pemerintahan, Pelayanan, Kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanggul tahun 2021 - 2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya sebagaimana berikut:

Realisasi Sasaran 1, yaitu meningkatnya penataan organisasi daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah berhasil dicapai dengan Tingkat realisasi sebesar 100 %, hal ini didasarkan pada data capaian program Kecamatan Tanggul tahun 2024. Realisasi tersebut terukur melalui pemenuhan seluruh indikator program yang ditetapkan, dengan rujukan pada dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah.

Dokumen – dokumen tersebut antara lain :

1. Dokumen Lakip tahun 2024
2. Dokumen Reformasi Birokrasi
3. Dokumen ANJAB
4. Dokumen Pelayanan Publik yang meliputi
 - Dokumen standart pelayanan
 - Dokumen SOP (*Standard Operating Procedure*) pelayanan publik
 - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Seluruh dokumen tersebut telah terpenuhi dan tersusun dengan baik pada tahun 2024, sehingga memberikan kontribusi terbaik terhadap peningkatan tata Kelola organisasi pemerintah daerah serta mutu pelayanan publik.

Realisasi Sasaran 2 : yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan, telah berhasil tercapai dengan sanga baik. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanggul tahun 2024 melalui penilaian E - SUKMA sebesar 87,72.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.

Data dan informasi IKM diperoleh melalui :

1. Penginputan dan pengolahan data menggunakan Sistem Informasi e SUKMA

2. Pedoman yang digunakan adalah Permen PANRB No mer 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

Penilaian IKM mencakup beberapa unsur pelayanan antara lain :

- a. Kesesuaian Persyaratan
- b. Waktu penyelesaian
- c. Produk Spesifikasi dan jenis pelayanan
- d. Kompetensi
- e. Perilaku pelaksana
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- g. Kualitas sarana dan prasarana

Seluruh unsur tersebut telah dinilai dan terpenuhi pada tahun 2024 sebagaimana tercemin dalam hasil IKM yang memuaskan, capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di kecamatan tanggul dikatagorikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Realisasi Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Persentase fasilitas kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan =

10 kegiatan fasilitas yang dilaksanakan	$X 100 \% = 100 \%$
10 kegiatan fasilitas yang direncanakan	

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sekaligus memfasilitasi rencana kegiatan tahun 2024.

1. Kegiatan Penanganan Stunting

Pemberian PMT (Pemberian makanan tambahan) berupa susu formula untuk mendukung percepatan penanganan stunting

2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas

- Pembinaan Kader Tagana (Kader Tagan : relawan sosial atau Tenaga yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial).
- Pembinaan pelaku UMKM untuk meningkatkan produktifitas usaha kecil dan menengah
- Pembinaan penanggulangan stunting

3. Kegiatan Sosial, Budaya dan Keagamaan

- Kerja bakti dan gotong royong lingkungan
 - Sholat shubuh berjamaah antara aparat desa, Kecamatan dan Masyarakat. Dilaksanakan secara bergiliran di masing masing desa.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang untuk menyerap aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
 5. Program Akselerasi Kesehatan Masyarakat
 - Akselerasi penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi), AKBAL (Angka Kematian Balita), dan Stunting melalui berbagai intervensi program Kesehatan.
 6. Pendampingan Bantuan Sosial
 - Pendampingan Kegiatan Bantuan Sosial Seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPHT,BLT Dari Kementrian Sosial

Semua kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong keberdayaan Masyarakat secara akuntabel dan holistik, sehingga dapat menciptakan Masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Program program ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi dan sosial Masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Realisasi Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan. Persentase penyelesaian laporan pelanggaran Trantibum yang dilaksanakan =

7 Laporan yang terselesaikan	x 100 % = 100 %
7 Laporan Pelanggaran yang masuk	

Menunjukkan bahwa seluruh laporan pelanggaran telah terselesaikan dengan baik, sesuai ketentuan dan SOP yang ada. Laporan pelanggaran / aduan trantibun di tahun 2024 antara lain :

A. Gangguan Sosial

1. Ketertiban Umum dan Ketertiban
 - Pembongkaran Baliho / Spanduk/ Banner di tepi jalan besar
2. Kesejahteraan Sosial
 - Razia ODGJ
 - Razia Pengamen jalanan
 - Razia pengemis / Manusia Robot
3. Kegiatan Usaha

- Implementasi Surat Edaran Bupati tentang Pengaturan Tempat Hiburan dan dan penjualan makanan selama Ramadhan
- Implementasi Surat Edaran Bupati tentang pengaturan tempat hiburan dan karaoke

B. Gangguan Lingkungan

1. Bencana dan Kerusakan

- Penanganan Banjir di 8 Desa
- Sosialisasi deteksi dini penanganan bencana di kecamatan Tanggul

Realisasi Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Berdasarkan Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil Evaluasi atau implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember.

No	Komponen	Nilai Hasil Evaluasi
1	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	26,78
2	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	21,00
3	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	13,05
4	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,58
	JUMLAH	78,41

Secara umum, kecamatan tanggul telah menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat baik dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Namun ada ruang perbaikan terutama pada pemanfaatan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi di masa mendatang. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen Pan Nomer 88 Tahun 2021 Dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember

Realisasi Sasaran 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi sasaran ini mengacu pada indikator seluruh program perangkat daerah yang di rencanakan tahun 2024, berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Persentase Indikator Program yang tercapai =

4 Indiktor Program Yang Tercapai
4 Indikator Program

Adapun program program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan indikator
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum, dengan indikator

Semua program tersebut telah dilaksanakan dengan capaian kinerja mencapai 99 % , hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2024	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	-	4 Dokumen
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	67,8	82,37	80	87,72
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	95%	97%	100%	100 %
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	95%	100%	100%	100 %

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2024	2024
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	-	49,09	76,50	78,41
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	90%	98,71%

Sumber Data Realisasi: .

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Data Kinerja Bidang Pemerintahan Umum, PMKS, Trantibum, Sukma-e
3. Kertas kerja TC 25 dan TC 27
4. Renstra Tahun 2021 -2026

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.
- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.
- Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.
- Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.
- Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.
- Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4
**(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Tanggul dengan Realisasi Nasional/
Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,72	87,33 (IKM Kabupaten Jember)	
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	-	
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	-	
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	78,41	62,50 (Nilai SAKIP Kabupaten Jember)	
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	98,71 %	-	

Sumber Data:

1. Data Kinerja Kecamatan Tanggul Tahun 2024
2. SUKMA-e Kecamatan Tanggul
3. Laporan pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jenber Tahun 2024
4. LHE AKIP Kabupaten Jember Tahun 2024

Dari enam indikator Kecamatan Tanggul, sebanyak 4 indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional, realisasi kabupaten dan realisasi provinsi

jawa timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama .Untuk Indikator IKM dan Nilai SAKIP dapat dibandingkan dengan realisasi kabupaten.

Realisasi kinerja atas indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama

Realisasi IKM Kecamatan Tanggul tahun 2024 sebesar 0,39 poin lebih tinggi dibandingkan dengan IKM Kabupaten Jember Tahun 2024, Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di kecamatan tanggul cukup optimal dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Realisasi kinerja atas indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama

Realisasi kinerja atas indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama

Realisasi kinerja atas indikator Nilai SAKIP OPD Kecamatan Tanggul tahun 2024 lebih tinggi 15,91 poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember

Realisasi kinerja atas Indikator Program yang tercapai tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			
	Kegiatan A.1 Perencanaan, penganggaran, dan evalauasi kinerja perangkat daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 18.164.000	Rp17.860.000	98,33 %
	Kegiatan A.1 Administrasi keuangan perangkat daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.2.685.393.083	Rp.2.082.022.489	78,53 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Rp 63.010.000	Rp 63.010.000	100 %
	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 52.500.000	Rp 49.845.000	94,94 %
	Kegiatan A.1 Administrasi umum perangkat daerah			
	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 3.150.000	Rp 2.850.000	90,48 %
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan	Rp 106.693.000	Rp 104.467.700	97,62 %

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	perlengkapan kantor			
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 4.868.700	Rp 4.470.000	91,81 %
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 3.632.500	Rp 3.630.400	99,94 %
	A.1 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 42.345.000	Rp 41.214.136	97,33 %
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100 %
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 581.260.732	Rp . 570.243.120	98.10 %
	Kegiatan A1 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 35.750.000	Rp34.427.950	96,30 %
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Rp 30.000.000	Rp 28.432.800	94,78 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 40.529.620	Rp19.223.500	47,43 %
Total		Rp 3.687.296.635	Rp3.041.697.095	91,83%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Kegiatan A.2 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Rp 805.200.000	Rp771.600.000	95,83 %
	Kegiatan A.1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 5.400.000	Rp3.400.000	62,96 %
Total		Rp 810.600.000	Rp 775.000.000	79,40%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Kegiatan A.3 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa	Rp 5.800.000	Rp4.200.000	72,41 %
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 45.839.000	Rp44.030.000	96,05 %
Total		Rp 51.639.000	Rp 48.230.000	84,23%
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Kegiatan A.4 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisia negara Republik Indonesia	Rp 129.506.000	Rp95.743.000	73,93 %
Total		Rp 129.506.000	Rp 95.743.000	73,93%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	-	-	-	-
Sasaran 6 : Meningkatnya Penataan organisasipe merintah daerah dan tata laksana penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik.	-	-	-	-

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1 : Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daaerah** adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah**

1. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	18.164.000	17.860.000
Output	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	1

2. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	2.685.393	2.082.022.489
Output	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	20	17

3. Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	63.010.000	63.010.000
Output	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1

Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	52.500.000	49.845.000
Output	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	Paket	37	36

DOKUMENTASI BELANJA PAKAIAN DINAS KANTOR KECAMATAN TANGGUL



Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	3.150.000	2.850.000
Output	Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1

2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	106.693.000	104.467.700
Output	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2

3. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	4.868.700	4.470.000
Output	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1

4. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	3.632.500	3.630.400
Output	Jumlah Paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1

Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	42.345.000	41.214.136
Output	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	Laporan	12	12

2. Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	20.000.000	20.000.000
Output	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Laporan	1	1

3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	581.260.732	570.243.120
Output	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	3

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan diunas atau kendaraan dinas jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	35.750.000	34.427.950
Output	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1

**DOKUMENTASI PERAWATAN KENDARAAN DINAS JABATAN
MOBIL CAMAT
KANTOR KECAMATAN TANGGUL**



2. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	30.000.000	28.432.800
Output	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	1

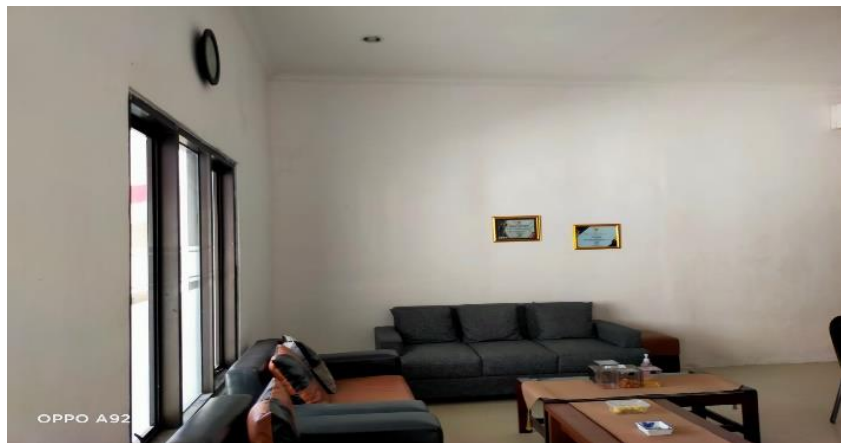
**DOKUMENTASI PERAWATAN KENDARAAN DINAS LAPANGAN
POLISI PAMONG PRAJA
KANTOR KECAMATAN TANGGUL**



3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	40.529.620	19.223.500
Output	Jumlah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dokumen	1	1

DOKUMENTASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (PENGECATAN)



**DOKUMENTASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
(PENGECATAN)**



2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

1. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	805.200.000	771.600.000
Output	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	1	1

Dalam pelaksanaannya untuk rincian Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tanggul ada 3 (tiga) yaitu :

a. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi yang dilaksanakan sesuai dokumen DPA Tahun 2024, Rapat Koordinasi Kecamatan Tanggul bertujuan sebagai berikut :

- Sebagai wadah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- Mencapai kesepakatan dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan.
- Sebagai pedoman konkret dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan adaptif.
- Menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rapat koordinasi Kecamatan Tanggul dalam 1 tahun diadakan 8 kali. Semua pelaksanaan kegiatan Rakor dipimpin oleh Ibu Camat Tanggul dan menghadirkan Sekretaris Kecamatan Tanggul, Kasi Pemerintahan, Kasi PMKS, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Trantib, Kasubag Umum Kepegawaian, Kasubag Perencanaan Kecamatan Tanggul, Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Tanggul, Pendamping Desa di wilayah Kecamatan Tanggul, Muspika, dan Dinas Instansi di Wilayah Kecamatan Tanggul.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan membahas berbagai isu terkait penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Tanggul. Dari permasalahan yang teridentifikasi, kemudian dilakukan diskusi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja masing-masing

Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara keseluruhan berjalan dengan baik. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terwujudnya kerja sama antar institusi pemerintah dalam wilayah administrasi Kecamatan Tanggul sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan



Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pemberian honor RT/RW Setiap Bulan)

b. Belanja jasa tenaga pelayanan umum melalui pemberian honor RT/RW setiap bulan merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat . Program ini mendukung peningkatan motivasi dan kinerja RT/RW dalam menjaga keteraturan lingkungan serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan pembayaran honor tepat waktu diharapkan RT/RW dapat lebih fokus menjalankan fungsi strategisnya dalam pembangunan masyarakat di tingkat pemerintahan paling bawah. Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas RT/RW sesuai rencana pembangunan tahun 2024

c. Pembinaan Monitoring dan evaluasi Administrasi Perangkat Desa
Pembinaan Administrasi Perangkat Desa dan Monitoring Dana Bantuan Keuangan bertujuan :

- Mengupayakan semua desa di wilayah Kecamatan Tanggul dapat menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi desa . kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien ditingkat desa. Dengan pembinaan yang sistematis, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak unsur kewilayahan.

Dengan kegiatan ini diharapkan kedepannya perangkat desa dapat secara konsisten menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Dana Bantuan Desa



1. Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	5.400.000	3.400.000
Output	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	1	1

Dalam Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan terealisasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan Umum Kecamatan Tanggul

Pelayanan Umum kepada masyarakat hingga saat ini berjalan dengan

lancar tanpa ada kendala. Pelayanan umum di Kecamatan Tanggul Meliputi Pelayanan Adminduk Dan Pelayanan Non Adminduk

Administrasi kependudukan merupakan penataan dan penertiban dalam bentuk dokumen serta data melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapaun dokumen adminduk dilaksanakan oleh pihak Disdukcapil Kabupaten dan Kecamatan. Pelayanan kependudukan di kecamatan ada beberapa jenis layanan administrasi kependudukan seperti pelayanan secara online, pelayanan yang langsung datang ke kantor kecamatan dan layanan jemput lansia. Pelayanan Adminduk dan Non Adminduk di Kecamatan Tanggul selama 1 tahun sebanyak 6.297 anantara lain :

➤ Pelayanan Adminduk :

- Pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) : Total berkas pengajuan KTP yaitu sejumlah 2.411 berkas.
- KK: Total berkas pengajuan KK yaitu sejumlah 1.753 berkas.
- Akta Kelahiran: Total berkas pengajuan Akta Kelahiran yaitu sejumlah 748 berkas.
- Akta Kematian: Total berkas pengajuan Akta Kematian yaitu sejumlah 17 berkas.
- KIA (Kartu Induk Anak): Total berkas pengajuan Kartu Induk Anak yaitu sejumlah 757 berkas.
- Surat Pindah : Total berkas pengajuan Surat Pindah yaitu sejumlah 336 berkas

➤ Pelayanan non Adminduk

- Legalisir Dokumen: Total berkas pengajuan Legalisir Dokumen yaitu sejumlah 102 berkas
- Keterangan Tidak Mampu: Total berkas pengajuan Keterangan Tidak Mampu yaitu sejumlah 148 berkas,
- IMB: Total berkas pengajuan IMB yaitu sejumlah 25 berkas.

Semua pengajuan berkas pelayanan sebanyak 6.297 di Kecamatan Tanggul telah selesai diproses, dicetak dan diberikan kepada pihak yang mengajukan.

DOKUMENTASI PELAYANAN UMUM KECAMATAN



b. Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan di Balai Desa Selodakon pada tanggal 31 Juli 2024 di Balai Desa Kramat Sukoharjo pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan mengundang peserta dari RT, RW, dan Perangkat Desa. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Tanggul dan Kapolsek Tanggul.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong terwujudnya keluarga sadar administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta menambah wawasan masyarakat untuk bisa bersama sama menyebarkan informasi terkait pengurusan administrasi kependudukan.

Hal-hal yang dibahas dalam kegiatan ini adalah tentang pengurusan administrasi KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA, Perpindahan Keluar, Kedatangan, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Melalui kegiatan ini, peserta yang mengikuti sosialisasi dapat menyampaikan kepada warga sekitar tempat mereka tinggal atau ke masyarakat secara umum untuk lebih tertib administrasi kependudukan dan

pentingnya melengkapi administrasi kependudukan.

Dari hasil yang dipaparkan di atas, kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Tanggul masuk dalam kategori Tinggi. Hal ini dibuktikan dengan perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga tanggal 30 Desember 2024 sebesar 87,72. Nilai IKM tersebut diperoleh dari survey masyarakat pada aplikasi e-Sukma .

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Adminduk Kecamatan Tanggul



3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

1. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	5.800.000	4.200.000
Output	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	lembaga	8	8

2. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Fórum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Terealisasi Dengan Rinciannya :

- 1) Kegiatan Pra-Musrenbang di Kecamatan Tanggul

Pra-musrenbang 8 desa di kantor kecamatan tanggul bertujuan membahas usulan antar wilayah desa , membentuk tim dan menyiapkan data untuk musrenbang kecamatan. Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan dana dari apbd. Kendala yang dihadapi waktu terbatas ketidak hadiran peserta dan usulan yang belum seluruhnya terpenuhi. Untuk meningkatkan efektivitas , disarankan agar usulan agar usulan dikumpulkan 1 minggu sebelumnya, hasil kegiatan pra musrenbang antara lain :

- Terbentuknya tim musrenbang tingkat kecamatan
- Agenda kerja
- Data pendukung

Kegiatan Pra Musrenbang diharapkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan yang lebih terarah di musrenbang tingkat kecamatan.

- 2) Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrebang Tingkat Kecamatan bertujuan mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan yang berasal dari masyarakat tingkat desa yang

menjadi skala prioritas pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satu tahun ke depan.

Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Kecamatan Tanggul tahun 2024 bertempat di Pendopo Kecamatan Tanggul pada tanggal 26 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Tanggul, Sekretaris Kecamatan Tanggul, Kasi dan Kasubag Kecamatan Tanggul, Dinas Instansi wilayah Kecamatan Tanggul, Kepala Desa dan Perangkat Desa wilayah Kecamatan Tanggul, Ketua TPPKK Kecamatan dan Desa, Pendamping Desa wilayah Kecamatan Tanggul, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat .

Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu diskusi, ketidakhadiran peserta, serta usulan yang belum seluruhnya terpenuhi dan dilaporkan . Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar usulan dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu sebelum musrenbang. Hasil kegiatan ini adalah usulan prioritas pembangunan 2025 dan berita acara musrenbang. Diharapkan usulan prioritas yang telah ditentukan dalam musrenbang tingkat kecamatan dapat terwujud sesuai target tahun 2025.

Pelaksanaan Kegiatan Muswarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Mususrebang) tahun 2024 dilaksanakan untuk menentukan usulan prioritas pembangunan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun 2025. Kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar dengan hasil berupa penyusunan Daftar Usulan RKP (DU-RKP) Tahun 2025.

DOKUMENTASI KEGIATAN PRA MUSRENBANG



DOKUMENTASI KEGIATAN MUSRENBANG



2. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	45.839.000	44.030.000
Output	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	1	1

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

1) Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan PKK

PKK di wilayah Kecamatan Tanggul merupakan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk membina keluarga agar dapat hidup sehat, sejahtera, maju, dan mandiri.

Untuk memaksimalkan tugas sekaligus koordinasi antara PKK Kecamatan dan PKK desa binaan, Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanggul secara rutin mengadakan kegiatan pertemuan rutin PKK secara setiap bulan dalam 1 tahun yang dihadiri oleh TP-PKK Kecamatan dan Desa, serta Pengurus PKK Kecamatan dan Desa. Pertemuan rutin PKK ini membahas

program kerja dan peran penting PKK dalam pemberdayaan masyarakat khususnya terkait upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting*.

Pertemuan rutin PKK secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dengan hasil yang dicapai yaitu komitmen PKK untuk mendukung dan ikut berpartisipasi dalam Program Pemerintah untuk penanggulangan dan pencegahan *stunting*.

DOKUMEN FOTO KEGIATAN PERTEMUAN RUTIN TP PKK TANGGUL KECAMATAN DAN TP.PKK DESA SEWILAYAH KECAMATAN TANGGUL TAHUN 2024



b. Penanganan *Stunting*

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi akibatnya dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme dan pertumbuhan fisik pada anak. Dampak dari *stunting* sangat merugikan bagi anak, salah satunya dapat mengalami keterbelakangan mental, rendah kemampuan belajar dan resiko mudah terserangnya penyakit kronis.

Penanggulangan permasalahan *stunting* di Kecamatan Tanggul dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, Muspika, PKK dan Kader Posyandu untuk penyaluran 120 kotak Susu formula bagi 30 balita *stunting* dengan tujuan memperbaiki gizi untuk tumbuh kembang pada dan penyaluran 60 kotak susu formula bagi 20 ibu hamil yang bertujuan memulihkan status gizi pada ibu hamil KEK

Selain pemberian susu formula, penanganan *stunting* juga dilakukan melalui kegiatan Rembug *Stunting* yang bertujuan untuk membahas isu-isu *stunting* dan merumuskan kebijakan dalam penanganan *stunting* serta pencegahannya

Dokumentasi Penanganan Stunting Kecamatan Tanggul Pemberian Susu Formula



Dokumentasi Penanganan Stunting Kecamatan Tanggul Kegiatan Rembug Stunting



2. PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang diberikan 3 bulan sekali. Peran Kecamatan dalam Program Keluarga Harapan antara lain:

- Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasana UPPKH Kecamatan
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pendamping PKH kecamatan Srandakan
- Melakukan koordinasi dengan desa dan perangkat desa terkait program keluarga harapan
- Mengupayakan lingkungan kerja yang dapat memotivasi pendamping agar meningkatkan kinerja dan produktivitas

Pemberian PKH di Kecamatan Tanggul dalam 1 tahun 2024. Sebanyak 2.880 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Darungan Sebanyak 574 KPM
- Desa Klatakan Sebanyak 244 KPM
- Desa Kramat Sukoharjo Sebanyak 249 KPM
- Desa Manggisian Sebanyak 492 KPM
- Desa Patemon Sebanyak 310 KPM
- Desa Selodakon Sebanyak 318 KPM
- Desa Tanggul Kulon Sebanyak 285 KPM
- Desa Tanggul Wetan Sebanyak 408 KPM

Dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanggul dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Tanggul.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah dana	Rp	129.506.000	95.743.000
Output	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	2

Dalam pelaksanaan Sub Indikator Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Seksi ketentraman dan ketertiban (Trantib) Kecamatan Tanggul selama tahun 2024 telah melaksanakan koordinasi dengan Polsek Tanggul, Koramil Tanggul, Satpol PP Kecamatan Tanggul dan unsur masyarakat. Menghasilkan 2 kegiatan dengan 6 laporan laporan sebagai dokumentasi kegiatan. Tujuan Utamanya menciptakan situasi tertib, aman, dan kondusif. Berikut ini kegiatan pendukung penertiban dan keamanan Kecamatan Tanggul antara lain :

1. Pelaksanaan Kegiatan Upacara HUT RI

Rangkaian Pengamanan dan pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanggul dalam rangka HUT RI ke 79. di Alun-Alun Tanggul diawali dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih pada pukul 07.00.WIB. Upacara pengibaran bendera HUT RI ke 79 dipimpin oleh Camat Tanggul HANIFAH, S.Pt, M.Si sebagai inspektur upacara. Dengan peserta upacara merupakan undangan dari Koramil Tanggul, Polsek Tanggul, Dinas Instansi sewilayah kecamatan tanggul, pelajar SMP sampai dengan SMA , guru guru sewilayah Kecamatan

Tanggul.

Kasi trantib beserta anggota Satpol PP berperan melakukan pengamanan dan pengawalan selama kegiatan pengibaran bendera merah putih hingga selesai pada pukul 10.00 wib.

Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB anggota Satpol PP, melakukan pengamanan dan pengawalan penurunan bendera hingga pada pukul 17.00 wib. Rangkaian kegiatan pengamanan dan pengawalan Satpol PP selama kegiatan perayaan HUT RI-79 berlangsung dengan baik, tertib dan aman

2. Kegiatan Trantibum Kecamatan Tanggul

Kegiatan rutin Trantibum antara lain:

- a. Penertiban pedagang kaki lima di sekitar kantor pegadaian dan kantor pos tanggul, dan kantor Kecamatan Tanggul
- b. Pembongkaran Baliho di sekitar kantor pegadaian dan kantor pos tanggul, dan kantor Kecamatan Tanggul

Kegiatan penertiban dilakukan secara persuasif dan edukatif terhadap pedagang kaki lima, hal tersebut dilakukan guna menjamin ketertiban umum dan mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sekitar kantor pegadaian, kantor pos dan kantor kecamatan tanggul.

Meski rutin dilakukan penertiban, tidak sedikit pedagang yang masih bersikeras berjualan setelah beberapa waktu. Untuk itu dari pihak Trantibum secara rutin tetap kita berikan pengarahan, himbauan dan pembinaan agar tidak berjualan lagi di area yang dilarang dan mematuhi peraturan berjualan sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima (PKL) yaitu :

- a) agar tercipta ketertiban dan keindahan.
 - b) kantor pos, kantor pegadaian tanpa penghalang gerobak dan bangunan liar pedagang sehingga tanpak bagus dan bersih.
 - c) Trotoar di sepanjang kantor kantor bisa berfungsi kembali sebagai tempat pejalan kaki
- c. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
 - d. Penertiban Pengamen Jalanan
 - e. Penertiban pengemis dan manusia robot
 - f. Penertiban tempat hiburan dan penjual makanan selama bulan ramadhan
 - g. Mitigasi bencana alam

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai arahan dari Bapak Kasi Trantib, sesuai dengan SOP dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

DOKUMENTASI KEGIATAN HUT RI DAN KEGIATAN RUTIN TRANTIBUM





D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Sumberdaya Manusia Kecamatan Tanggul berjumlah 34 orang, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp 4.679.041.635, melaksanakan 4 program 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	-	Efisien
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	110%	79,40 %	Efisien
3. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di kecamatan	100 %	84,23 %	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan	100 %	73,93 %	Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	112 %	-	Efisien
6. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	109,68 %	91,83 %	Efisien

Sumber : Data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dikategorikan efisien/tidak efisien dengan capaian kinerja 100 %

Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Tanggul dapat dikategorikan efisien karena hasil IKM **110%** capaian kinerja lebih besar daripada 79,40 % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat

di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena **100 %** capaian kinerja lebih besar daripada 84,23 % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena **100 %** capaian kinerja lebih besar daripada 73,93 % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien dapat dikategorikan efisien dengan capaian kinerja **112 %**

Capaian kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat dikategorikan efisien karena **109,68 %** capaian kinerja lebih besar daripada 91,83 % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Tanggul menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						
Indikator 1.1 Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	100 %	✓				
Rata – rata capaian	100 %	✓				
Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan		✓				

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Indikator 2.1 Indeks kepuasan masyarakat	110 %	✓				
Rata rata capaian	110 %	✓				
Sasaran 3 Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di kecamatan						
Indikator 3.1 Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	✓				
Rata rata capaian	100 %	✓				
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan		✓				
Indikator 4.1 Persentase Tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100 %	✓				
Rata rata capaian	100 %	✓				
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien						
Indikator 5.1 Nilai SAKIP OPD	112 %	✓				
Rata rata capaian	112 %	✓				
Sasaran 6 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah						
Indikator 6.1 Persentase indicator program yang tercapai	109,68 %	✓				
Rata rata capaian	109,68 %	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategi Kecamatan Tanggul :

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tabel 3.7, capaian rata rata indicator sasaran Kecamatan Tanggul menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai capaian sebesar 105 % Capaian ini masuk dalam kategori sangat tinggi, menunjukkan kinerja yang optimal. Secara keseluruhan, Kecamatan Tanggul telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kewilayahan dengan baik, hal ini membuktikan bahwa tujuan organisasi yang tertuang dalam Renstra telah dicapai dengan efektif.

Perincian Data Realisasi per-sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Tingkat realisasi sasaran ini mencapai predikat sangat tinggi tercatat sebesar 100 % Yang didasarkan pada capaian program Kecamatan Tanggul tahun 2024. Realisasi ini terukur melalui pemenuhan seluruh indicator program yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada dokumen dokumen berikut

1. Dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 .
2. Dokumen ANJAB (Analisis Jabatan).
3. Dokumen Penataan Organisasi/Kelembagaan, yang mencakup :
 - a. Data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi.
 - b. Laporan system kerja
4. Dokumen pelayanan public dan tata laksana , meliputi
 - a. Dokumen standart pelayanan.
 - b. Dokumen SOP (Standart Operating Procedure) pelayanan public
 - c. Laporan Survey kepuasan mnasyarakat
 - d. Laporan forum konsultasi public (FKP)

Seluruh dokumen tersebut telah disusun dan dipenuhi dengan baik pada tahun 2024, hal ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan tata Kelola organisasi pemerintah daerah dan mutu pelayanan publik di Kecamatan Tanggul .

Dengan demikian kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa Kecamatan Tanggul mampu menjalankan program dan kegiatan yang sejalan dengan tujuan strategis organisasi, serta memberikan dampak positif terhadap Masyarakat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan capaian rata rata sasaran telah mencapai 110 % Predikat sangat tinggi, meski begitu masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di Kecamatan Tanggul.

Faktor keberhasilan dan kendala sebagai berikut

1. Faktor Keberhasilan antara lain :
 - a. Program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
 - b. Koordinasi antar perangkat daerah yang baik
 - c. Langkah awal peningkatan saran dan prasarana layanan administrasi kependudukan (ADMINDUK).
2. Namun beberapa kendala masih ada, seperti :
 - a. Beberapa layanan belum memenuhi harapan Masyarakat
 - b. Sarana dan prasarana terbatas yaitu fasilitas pelyanan di beberapa desa masih minim
 - c. Sumber daya manusia kurang kompeten, kapasitas penyelenggara layanan perlu ditingkatkan.
3. Solusi dan Langkah strategis untuk mengatasi kendala antara lain :
 - a. Menyusun SOP dan persyaratan layanan yang seragam
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan menambah fasilitas pelayanan
 - c. Memberikan pelatihan rutin bagi sumber daya manusia agar lebih professional.
 - d. Memperluas layanan berbasis digital, seperti administrasi online dan pengaduan elektronik.
 - e. Melakukan Survey kepuasan Masyarakat secara rutin (e SUKMA) untuk menemukan dan memperbaiki kekurangan.
4. Rencana ke depan antara lain :
 - a. Perangkat Daerah menetapkan target yang realistis berdasarkan evaluasi sebelumnya
 - b. Mengintegrasikan perencanaan program dengan tujuan strategis daerah
 - c. Memanfaatkan tekhnologi informasi untuk mempercepat pelayanan
 - d. Membuat system pemantauan dan evaluasi yang transparan.

5. Inovasi dan Kolaborasi

Inovasi penting yang dapat dikembangkan adalah Masyarakat seluruh wilayah kecamatan tanggul mengetahui persyaratan terlebih dahulu tanpa datang ke kantor desa maupun kantor kecamatan dikarenakan meminta surat keterangan terlebih dahulu dari RT/RW sebagaimana dari ketua RT/RW berinovasi kepada Masyarakat untuk memberikan arahan atau tata cara pengurusan berkaitan dengan surat surat. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal dapat membantu mengidentifikasi kbutuhan Masyarakat dan meningkatkan layanan di desa . Dengan Langkah Langkah ini , diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tanggul terus meningkat terus dan dapat memenuhi harapan Masyarakat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi sasaran strategis menunjukkan capaian yang memuaskan dengan rata-rata 100 untuk indikator fasilitas kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan. Predikat sangat tinggi mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program yang mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat di tingkat Kecamatan. Faktor Keberhasilan,Kendala, Solusi dan Inovasi Kecamatan Tanggul dalam sasaran 3 antara lain

1. Faktor Kendala
2. Solusi mengatasi kendala yang ada, beberapa Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi :
 - a. Memberikan pelatihan rutin aparatur kecamatan dan desa lebih kompeten
 - b. Mengajak Masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam program kesejahteraan melalui sosialisasi dan pelibatan langsung
 - c. Mengevaluasi program yang kurang efektif agar bisa diperbaiki atau disesuaikan supaya lebih efisien
 - d. Mengajukan tambahan anggaran dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal
3. Agar hasil rencana peningkatan kinerja baik dan terus berlanjut, Langkah Langkah ini bisa diambil :
 - a. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan program

- b. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan program perjalanan sesuai rencana.
 - c. Menyusun target program yang spesifik, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat
 - d. Mengintegrasikan program dengan kebijakan daerah agar lebih selaras dan efektif.
4. Inovasi dan Kerjasama menjadi keberhasilan . Beberapa Langkah yang dapat dilakukan antara lain :
- a. Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah akses layanan kesejahteraan Masyarakat
 - b. Melibatkan warga lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program
 - c. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini Kecamatan memastikan program berjalan dengan baik

Dengan Langkah-langkah ini, diharapkan program kesejahteraan Masyarakat bisa terus ditingkatkan dan memberikan dampak yang nyata bagi Masyarakat luas.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan capaian rata – rata sasaran telah mencapai predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 100 % Meski begitu masih ada tantangan/kendala yang perlu diatasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di kecamatan tanggul. Faktor Keberhasilan, Kendala dan Solusi dan inovasi pada sasaran 4 antara lain :

1. Faktor Keberhasilan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan tanggul yaitu :
 - a. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan Masyarakat.
 - b. Program yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat .
2. Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran dan fasilitas yang memadai
3. Untuk mengatasi kendala tersebut, Solusi yang dilakukan antara lain
 - a. Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan program kepada Masyarakat

- b. Membuat target yang lebih jelas dan terukur berdasarkan capaian sebelumnya
 - c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di kecamatan agar lebih mampu mengelola program dengan baik.
 - d. Mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih baik untuk memantau pelaksanaan program
4. Inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa Langkah yang dapat dilakukan antara lain :
- a. Mengembangkan aplikasi untuk pelaporan dan monitoring ketertiban yang lebih mudah diakses Masyarakat
 - b. Melibatkan Masyarakat dalam merancang dan menjalankan program ketertiban

Dengan langkah - langkah ini, diharapkan Kecamatan Tanggul bisa terus menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan lebih efektif di masa depan .

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Hasil evaluasi kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa Kecamatan Tanggul berhasil mencapai predikat sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 112 % Capaian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul telah dilaksanakan dengan sangat baik untuk mendukung tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu berdasarkan Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh kabupaten Jember, hasil penilaian menunjukkan angka sebagai berikut

No	Komponen	Nilai Hasil Evaluasi
1	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	26,78
2	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	21,00
3	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	13,05
4	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,58
	JUMLAH	78,41

Dengan nilai 78,41 Kecamatan Tanggul telah menunjukkan kinerja yang cukup baik hingga sangat baik dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan

kinerja. Namun masih ada perbaikan pada pemanfaatan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dimasa mendatang, kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Pemen PANRB nomer 88 tahun 2021 dan pedoman Evaluasi Internal Pemkab Jember. Meski hasilnya cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam :

1. Menyusun rencana yang lebih terkait rencana Pembangunan Kabupaten Jember.
 2. Memperbaiki cara pengukuran kinerja agar lebih tepat sasaran
 3. Menggunakan hasil evaluasi untuk membuat yang lebih baik dan efektif
- Dengan perbaikan ini, Kecamatan Tanggul dapat terus meningkatkan pelayanan dan kinerja demi kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 6 mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 109 % Di bawah ini ada beberapa faktor pendukung, kendala dan rencana untuk ke depannya sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung Keberhasilan
 - a. Program yang tepat sasaran. Sumber daya manusia yang kompeten
 - b. Strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Beberapa faktor kendala yaitu
 - a. Perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian mendadak.
 - b. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.
 - c. Kurangnya sumberdaya manusia dan anggaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut , beberapa Langkah strategis perlu dilakukan, di antaranya :

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia sesuai prioritas program dan anggaran digunakan secara efisien.
- b. Penyesuaian regulasi di sesuaikan dengan aturan dan kebijakan terbaru dan membuat panduan kerja (SOP) yang lebih fleksibel agar perangkat daerah bisa lebih mudah beradaptasi
- c. Pemantauan dan evaluasi untuk memantau kinerja secara evaluasi rutin agar masalah cepat terdeteksi dan diperbaiki.

3. Rencana efektif untuk masa depan dengan tujuan meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja antara lain :
 - a. Menyusun target yang lebih realistis berdasarkan data capaian sebelumnya
 - b. Memastikan program dan kegiatan direncanakan secara terintegrasi agar selaras dengan sasaran strategis daerah
 - c. Memberikan pelatihan bagi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi masing - masing .
 - d. Membuat tim pelaksanaan pelaksanaan program yang jelas dan terukur untuk meminimalkan keterlambatan.

Dengan perbaikan ini, Kecamatan Tanggul dapat meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp4.679.041.635 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.616.504.335 terealisasi sebesar Rp3.898.540.095,- (84,45%)
2. Belanja Modal sebesar Rp62.537.300 terealisasi sebesar Rp62.130.000,- (99,35 %)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Tanggul Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.687.296.635	Rp 2.979.567.095	80,81 %
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp18.164.000	Rp 17.860.000	98,33 %
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp18.164.000	Rp 17.860.000	98,33 %
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp2.748.403.083	Rp 2.145.032.489	78,05 %
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp2.685.393.083	Rp 2.082.022.489	77,53 %
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp63.010.000	Rp 63.010.000	100 %
1.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp52 .500.000	Rp 49.845.000	94,94 %
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp52.500.000	Rp 49.845.000	94,94 %
1.4	Administrasi umum perangkat daerah	Rp118.344.200	Rp 115.418.100	97,42 %
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.150.000	Rp.	90,48 %
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp106.693.000	Rp 104.467.700	97,62%
1.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp4.868.700	Rp 4.470.000	91,81%
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp3.632.500	Rp 3.630.400	99,94 %
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp643.605.732	Rp631.457.256	98,11 %
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp42.345.000	Rp41.214.136	97,33 %
1.5.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp20.000.000	Rp20.000.000	100 %
1.5.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp581.260.732	Rp570.243.120	98,10 %
1.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp106.279.620	Rp.82.084.250	77,23 %
1.6.1	Penyediaan jasa	Rp35.750.000	Rp.34.427.950	96,30 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
1.6.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp30.000.000	Rp28.432.800	94,78 %
1.6.3	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp40.529.620	Rp19.223.500	47,43 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp810.600.000	Rp775.000.000	95,61 %
2.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Rp805.200.000	Rp771.600.000	95,83 %
2.1.1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Rp805.200.000	Rp771.600.000	95,83 %
2.2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp5.400.000	Rp3.400.000	62,96 %
2.2.1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 5.400.000	Rp3.400.000	62,96 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 51.639.000	Rp48.230.000	93,40 %
3.1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp 51.639.000	Rp48.230.000	93,40 %
3.1.1	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah operencanaan pembangunan di desa	Rp 5.800.000	Rp4.200.000	72,41 %
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Rp45.839.000	Rp44.030.000	96,05 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Rp129.506.000	Rp95.743.000	73,93 %
4.1	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp129.506.000	Rp95.743.000	73,93 %
4.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp129.506.000	Rp95.743.000	73,93 %

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tanggul Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Tanggul sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Tanggul disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Tanggul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 (enam) indikator mencapai target dengan kategori sangat tinggi.

Faktor kunci keberhasilan pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 antara lain:

1. Keterlibatan Masyarakat dalam berbagai program di Kecamatan Tanggul menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.
2. Program yang dijalankan di Kecamatan Tanggul sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, memungkinkan tercapainya hasil yang optimal. Pendekatan berbasis kebutuhan Masyarakat ini membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif
3. Adanya Sinergi, koordinasi, kolaboratif dan evaluasi dengan lintas sektor terkait

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Membuat Rencana aksi yang efektif, efisien dan selaras dengan Renstra
2. Menggunakan anggaran secara efisien untuk meningkatkan pelayanan
3. Evaluasi program secara berkala untuk menemukan yang kurang efektif dan disesuaikan agar lebih efisien, prima dan berdampak
4. Peningkatan kemampuan aparatur dengan pelatihan agar mereka bisa lebih baik dalam menjalankan program

Dengan langkah langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Tanggul dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja di masa depan serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan akuntabel kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tanggul yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Jember, 20 Januari 2025

Camat Tanggul
Kabupaten Jember



[Handwritten Signature]
Hanifah, S.Pt, M.Si
Pembina

NIP. 19710123 200604 2 021

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. KERTAS KERJA TC 25 DAN TC 27

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Tanggul (Pemutakhiran)

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	B (65)	B (65)	B (70)	A (80)	A (85)
		Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	85%	90%	95%	100%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80	80
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Jember, 12 Agustus 2023
CAMAT TANGGUL

HANIFAH, S.Pt.M.Si
Pembina
NIP. 19710123 200604 2 021

KERTAS KERJA PEERANGKAT DAERAH
Tabel TC. 27 Renstra Kecamatan Tanggul (Pemutakhiran)

RUTIN
SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
INDIKATOR : NILAI SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Formula Perhitungan Ketercapaian	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Sesudah Perubahan																						
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.				Nilai SAKIP OPD	-	-			B (65)		BB (70)		A (80)		A (85)		A (85)					
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program yang tercapai	%	-	-	-	85	3.120.580.000	90	3.150.914.000	95	3.228.654.000	100	3.431.503.000	100	12.929.651.000				
		7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	-	-	-	85	3.120.580.000	90	3.150.914.000	95	3.228.654.000	100	3.431.503.000	100	12.929.651.000		
		7	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	16	50000000	16	50000000	16	50000000	16	50000000	84	200.000.000	
		7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok.	-	-	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	32	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Dok.	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Dok.	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	Lap.	-	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	12	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap.	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Sub Bag, Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan
		7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	-	-	54	2378854000	53	2378854000	53	2378854000	53	2378854000	213	9.515.416.000	
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OR	-	-	21	2.283.854.000	20	2.283.854.000	20	2.283.854.000	20	2.283.854.000	81	9.135.416.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dok.	-	-	12	81.000.000	12	81.000.000	12	81.000.000	12	81.000.000	48	324.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi	Dok.	-	-	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	4	24.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan Kantor Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Formula Perhitungan Ketercapaian
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		7 1 1 02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Lap.	--	--	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan	
		7 1 1 02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Lap.	--	--	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	72	12.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan	
		7 1 1 02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	--	--	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	4	72.000.000			
		7 1 1 02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD	Dok.	--	--	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	Lap.	--	--	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD	Lap.	--	--	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	8.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketastabahaan dan kepegawain	Dokumen	--	--	1	280.500.000	1	280.500.000	1	280.500.000	1	280.500.000	4	1.122.000.000			
		7 1 1 02.05	2	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	--	--	3	18.000.000	37	18.000.000	37	18.000.000	37	18.000.000	114	72.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.05	3	Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pengolahan Administrasi kepegawain	Dok.	--	--	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	10.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti dilat	Orang	--	--	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	80	800.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	Orang	--	--	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	80	240.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	--	--	3	176.400.000	3	176.400.000	3	176.400.000	3	176.400.000	12	705.600.000			
		7 1 1 02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	--	--	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	4	6.800.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06	2	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	--	--	1	63.000.000	2	63.000.000	2	63.000.000	2	63.000.000	7	262.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06	3	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	--	--	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	8.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	--	--	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	4	24.800.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	--	--	1	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	7	24.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Dok.	--	--	50	1.500.000	50	1.500.000	50	1.500.000	50	1.500.000	200	6.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap.	--	--	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	4	130.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Lap.	--	--	1	63.500.000	1	63.500.000	1	63.500.000	1	63.500.000	4	254.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Laporan	--	--	1	11.826.000	1	42.160.000	1	117.900.000	1	267.748.000	4	439.635.000			
		7 1 1 02.07	1	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	--	--	0	0	0	0	0	0	1	267.748.000	1	267.748.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	--	--	0	0	0	0	5	117.900.000	0	0	5	117.900.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Angkutan Darat Tak bermotor	Unit	--	--	0	0	10	42.160.000	0	0	0	0	10	42.160.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Kantor Kecamatan Tanggul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Formula Perhitungan Ketercapaian	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		7 1 1 02.07	5	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disiapkan	Paket	-	-	-	2	11.826.000	0	0	0	0	0	0	2	11.826.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	-	3	112.000.000	3	112.000.000	3	112.000.000	3	112.000.000	12	448.000.000			
		7 1 1 02.05	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap.	-	-	-	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	4	36.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Lap.	-	-	-	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	48	64.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lap.	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Lap.	-	-	-	3	77.000.000	3	77.000.000	3	77.000.000	3	77.000.000	12	308.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	-	3	93.000.000	3	93.000.000	3	93.000.000	3	148.000.000	12	427.000.000			
		7 1 1 02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	-	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	-	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	88.000.000	4	187.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	
		7 1 1 02.09	9	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tanggul	

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Formula Perhitungan Ketercapaian	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.				Dokumen 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	4		4		4		4		16				
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		-	-	-	80		80		80		80		80				
		7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	-	-	-	100	1.113.000.000	100	1.113.000.000	100	1.113.000.000	100	1.113.000.000	100	1.452.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Formule Perhitungan Ketercapaian
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		7.1.2.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	--	--	85	875.932.500	90	875.932.500	95	875.932.500	100	875.932.500	100%	3.503.730.000				
		7.1.2.02.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok.	--	--	8	875.932.500	2	875.932.500	2	875.932.500	2	875.932.500	14	3.503.730.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tanggul		
		7.1.2.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	--	--	80	237.067.500	90	237.067.500	80	237.067.500	80	237.067.500	80	948.270.000			Urusan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja di Wilayah Kecamatan: 1. Administrasi 2. SKM 3. Keterangan Ahli Waris 4. Dispensasi Nikah 5. Perizinan (IMB) 6. Pengajuan Proposal	
		7.1.2.02.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap.	--	--	6	237.067.500	6	237.067.500	8	237.067.500	8	237.067.500	24	948.270.000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Tanggul		
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan			Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	%	--	--	100		100		100		100		100				1. Pendataan 2. Fasilitas Penitranan Bantuan	
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	--	--	100	1.130.000.000	100	1.130.000.000	100	1.130.000.000	100	1.130.000.000	100	4.520.000.000			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan (Pelatihan, Pembelian Stimulan, dll) dibagi dengan seluruh desa/kelurahan	
		7.1.3.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	--	--	85	1.130.000.000	90	1.130.000.000	95	1.130.000.000	100	1.130.000.000		4.520.000.000			Persentase yang direncanakan terhadap yang terealisasi	
		7.1.3.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemb./ Desa	--	--	6	343.624.000	6	343.624.000	6	344.124.000	8	344.624.000	24	1.375.422.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tanggul		
		7.1.3.02.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap.	--	--	12	786.950.000	12	786.375.000	12	786.876.000	12	786.378.000	48	3.144.578.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tanggul		
	Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan			Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	%	--	--	100		100		100		100		100				Laporan yang masuk dan ditindaklanjuti terhadap seluruh laporan yang masuk	
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketertiban dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	--	--	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	4.064.000.000			Persentase yang direncanakan terhadap yang terealisasi	
		7.1.4.02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	--	--	85	508.000.000	80	508.000.000	95	508.000.000	100	508.000.000	100	2.032.000.000			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dibagi dengan seluruh desa/kelurahan	
		7.1.4.02.02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lap.	--	--	6	508.000.000	2	508.000.000	2	508.000.000	2	508.000.000	12	2.032.000.000	Seksi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tanggul		
		7.1.4.07.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	%	--	--	-	508.000.000	80	508.000.000	80	508.000.000	80	508.000.000	80	2.932.000.000			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum dibagi dengan seluruh desa/kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Formula Perhitungan Ketercapaian	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		7 1 4 07.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap.	--	--	1	380.000.000	6	380.000.000	6	380.000.000	6	380.000.000	19	1.520.000.000	Seksi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Kecamatan Tanggul		
		7 1 4 07.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lap.	--	--	1	128.000.000	6	128.000.000	6	128.000.000	6	128.000.000	19	512.000.000	Seksi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Kecamatan Tanggul		
		7 1 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	--	-	--	100	998.000.000	100	998.000.000	100	998.000.000	100	998.000.000	100	3.992.000.000			Jumlah Pendelegasian Tugas yang dilaksanakan dibagi seluruh Tugas yang didelegasikan
		7 1 5 02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum	Tugas	--	--	--	1	998.000.000	1	998.000.000	1	998.000.000	1	998.000.000	4	3.992.000.000			
		7 1 5 02.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketersediaan Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Diangani Sesuai Ketersediaan Perundang-Undangan	Lap.	--	--	--	1	398.000.000	1	398.000.000	1	398.000.000	1	398.000.000	4	1.592.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tanggul	
		7 1 5 02.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dok.	--	--	--	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tanggul	
		7 1 5 02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.	Dok.	--	--	--	1	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	13	1.200.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tanggul	

April 17 April 2023
 CAMAT TANGGUL
 HANIFAH, S.Pt.M.Si
 Pembina
 NIP. 197101232006042021

LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL
JL. . DIPONEGORO NO. 6 Telp. (0336) 441001 Jember 68155

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANIFAH, S.Pt., M.Si.

Jabatan : Camat Tanggul

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,


Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Pihak Pertama
CAMAT TANGGUL,


HANIFAH, S.Pt, M.Si
NIP. 19710123 200604 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN TANGGUL

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp	3.687.296.635	APBD
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp	810.600.000	APBD
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp	51.639.000	APBD
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp	129.506.000	APBD
	Jumlah	Rp	4.679.041.635	APBD


BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
CAMAT TANGGUL,


HANIFAH, S.Pt, M.Si
NIP. 19710123 200604 2 021



LAMPIRAN 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL**

JL. Diponegoro No. 6 Telp. 0336441001, Tanggul 68155

KEPUTUSAN CAMAT TANGGUL

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/36/35.09.06/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Tanggul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 2 Januari 2024

 CAMAT TANGGUL
HANIFAH, SPt., M.Si
NIP. 19710123 200604 2 021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

- Instansi** : Kecamatan Tanggul
- Tugas** :
- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di lakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Fungsi** :
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;

- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa / kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

-
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasik di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan : 1. Nilai SAKIP OPD
2. Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator: Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan / alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP OPD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

CAMAT TANGGUL



HANIFAH, Spt., M.Si
NIP. 19710123 200604 2 021





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN TANGGUL

JALAN DIPONEGORO NO 6 TANGGUL ☎ (0336) 441001 TANGGUL 68155

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Tw 1 : 20 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
		Tw 2 : 22 %						
		Tw 3 : 24 %						
		Tw 4 : 24 %						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : 1	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	O/B	Tw 1 : 60 Tw 2 : 60 Tw 3 : 60 Tw 4 : 60	



SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : 1	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	Tw 1 : - Tw 2 : 37 Tw 3 : - Tw 4 : -	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : 1 Tw 4 : -	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1 : - Tw 2 : 1 Tw 3 : 1 Tw 4 : -	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : 1	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : 1 Tw 4 : -	

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	Laporan	Tw 1 : 3 Tw 2 : 3 Tw 3 : 3 Tw 4 : 3	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : 1 Tw 4 : -	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	Tw 1 : - Tw 2 : 1 Tw 3 : 1 Tw 4 : 1	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : 1	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : 1	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : 1 Tw 4 : -	

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tw 1 : -	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Tw 2 : -						
		Tw 3 : 40						
		Tw 4 : 40						
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Tw 1 : -		
						Tw 2 : -		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Tw 3 : -				
				Tw 4 : 1				
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	Tw 1 : 50 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		Tw 2 :						
		Tw 3 :						
		Tw 4 : 50 %						

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga / Desa	Tw 1 : 8 Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : -	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Tw 1 : - Tw 2 : - Tw 3 : - Tw 4 : 1	
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	Tw 1 : - Tw 2 : 50 % Tw 3 : - Tw 4 : 50 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP OPD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP


CAMAT TANGGUL

HANIFAH, Spt., M.Si
NIP. 19710123 200604 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL

JALAN DIPONEGORO NO 6 TANGGUL ☎ (0336) 441001 TANGGUL 68155

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
 TAHUN 2024**

RPJMD

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	NILAI SAKIP
			Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

RKTr

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	85%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan SKPD	100%				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan Tanggul	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.164.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan SKPD	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 OB	2.685.393.083
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	63.010.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	37 Paket	52.500.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi penunjang umum SKPD	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.150.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	106.693.000
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.868.700
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.632.500
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan SKPD	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	42.345.000
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	20.000.000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	581.260.732
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik SKPD	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	35.750.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30.000.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	40.529.620
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%				
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	805.200.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.400.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	5.800.000
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	45.839.000

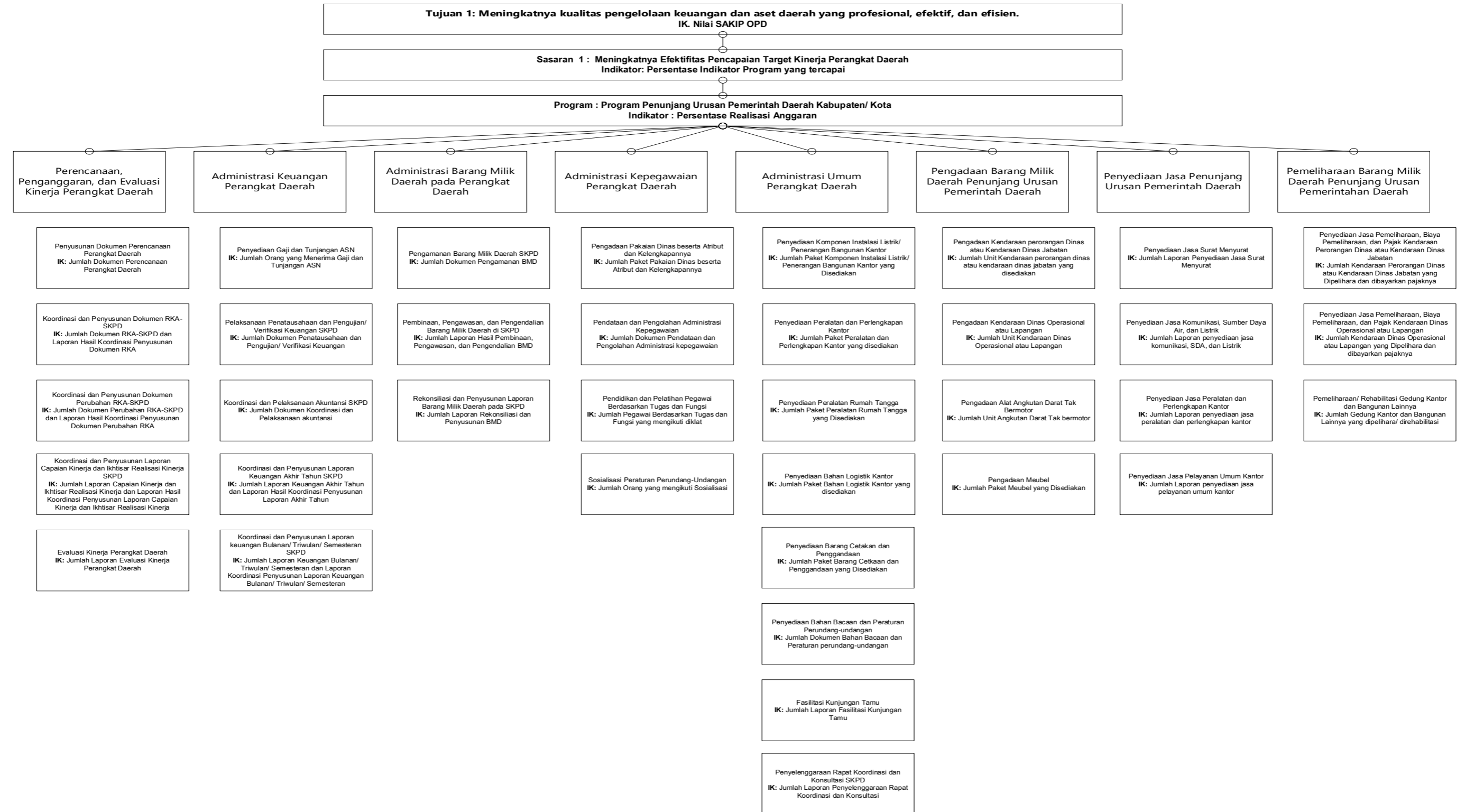
TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%				
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	129.505.000

Jember, 29 Januari 2024



HANIFAH, Spt, M.Si
NIP.197101232006042021

LAMPRANG 6. CASCADINGKECAMATANANGGUL



Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
IK: Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

